

## PENGARUH PERISTIWA MALARI 1974 TERHADAP KEMUNDURAN PERS MAHASISWA

**Agus Rustamana<sup>1\*</sup>, Mohammad Jordan Feshilal Antarik<sup>2</sup>, Hilma Liana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[agusrustamana65@gmail.com](mailto:agusrustamana65@gmail.com), [jordy.fesh27@gmail.com](mailto:jordy.fesh27@gmail.com), [hilmaliana089@gmail.com](mailto:hilmaliana089@gmail.com)

\*[agusrustamana65@gmail.com](mailto:agusrustamana65@gmail.com)

### Abstrak

Peristiwa Malari adalah singkatan dari Malapetaka 15 Januari, yaitu demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, yang dianggap sebagai simbol modal asing yang merugikan rakyat Indonesia. Artikel ini mengkaji tema seputar Peristiwa Malari 1974 terhadap kebebasan pers saat itu. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menelaah perkembangan pers – utamanya pers mahasiswa – di sekitaran peristiwa Malari (pra dan pasca), bagaimana masifnya kritik terhadap pemerintah melalui pemberitaan berbagai pers saat itu dianggap menjadi pemicu peristiwa Malari, serta respons apa yang diberikan pemerintah terhadap pers pasca peristiwa tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui sebuah kerja heuristik dan kritik sumber untuk menganalisis data yang didapat. Temuan utama menyoroti adanya pengaruh negatif pasca peristiwa Malari 1974 terhadap kemunduran pers Mahasiswa. Selain itu temuan lainnya ditemukan pembentukan jaringan mahasiswa yang dirintis sejak awal Orde Baru melalui beragam aktivitas seperti diskusi dan safari ke berbagai kampus.

**Kata kunci:** Pers; Mahasiswa; Peristiwa Malari 1974

### Abstract

*The Malari incident is an abbreviation of Malapetaka 15 January, namely student exposure and social broadcasting that occurred on January 15 1974 in Jakarta. This incident was triggered by the arrival of the Japanese Prime Minister, Tanaka Kakuei, who was considered a symbol of single capital that was detrimental to the Indonesian people. This article examines the themes surrounding the 1974 Malari Incident on press freedom at that time. The research in this article aims to examine the development of the press - especially the student press - around the Malari incident (pre and post), how massive criticism of the government through various press reports at that time was considered to be the trigger for the Malari incident, and what response the government gave to the press after the event. The method used is literature study through heuristic work and source criticism to analyze the data obtained. The main findings highlight the negative influence after the 1974 Malari*

*incident on student press writing. Apart from that, other findings found the formation of a student network that was initiated since the beginning of the New Order through various activities such as discussions and safaris to various campuses.*

**Keywords:** *Press; Student; Malari incident of 1974*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan masa orde baru adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI dan pemberian Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Pemerintahan orde baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila, yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Pemerintahan orde baru juga melakukan berbagai pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Namun, pemerintahan orde baru juga menuai berbagai kritik dan kontroversi, terutama terkait dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap oposisi politik. Pemerintahan orde baru berakhir pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter dan gerakan reformasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto.

Setelah peristiwa G.30/S/PKI, IPMI adalah lembaga pers mahasiswa Indonesia yang sepenuhnya terlibat dalam pelecehan Demokrasi Terpimpin. Akhirnya, mereka membentuk Aliansi Segitiga, yang terdiri dari aktivis pers mahasiswa, militer, dan teknokrat, dengan tujuan menghancurkan keadaan yang membelenggu bangsa dalam otoritarianisme. Pada awal abad ini, Pers Mahasiswa kembali ke lembaganya yang dahulu, IPMI. IPMI adalah lembaga mahasiswa di Indonesia yang secara eksplisit menentang kekurangan Demokrasi Terpimpin dan juga terlibat dalam aktivitas politik sebagai Biro Penerangan dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Di masa kini, kelompok KAMI yang paling terkenal adalah Mahasiswa Indonesia (Jabar) dan Mimbar Demokrasi (Bandung), yang keduanya merupakan penerbitan resmi IPMI.

Peristiwa Malari adalah singkatan dari Malapetaka 15 Januari, yaitu demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, yang dianggap sebagai simbol modal asing yang merugikan rakyat Indonesia. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok, membubarkan lembaga asisten presiden, dan menegakkan hukum terhadap koruptor. Namun, aksi tersebut disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Akibatnya,

sebelas orang tewas, ratusan luka-luka, dan ribuan ditangkap. Presiden Soeharto kemudian mengambil alih komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, serta memberhentikan beberapa pejabat tinggi negara.

Peristiwa Malari juga berdampak pada keberadaan pers saat itu. Pers yang ikut mengkritik pemerintah terkait isu modal asing dan menerbitkan berita tentang peristiwa Malari juga terkena dampak dari peristiwa tersebut. Beberapa media massa seperti Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, dan Sinar Harapan diberedel oleh pemerintah. Selain itu, beberapa wartawan dan aktivis pers juga ditangkap dan diinterogasi oleh aparat keamanan. Peristiwa Malari menjadi salah satu momen penting dalam sejarah pers Indonesia, karena menunjukkan tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

## **METODOLOGI**

Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, Kuntowijoyo (2011) menjelaskan terdapat lima tahapan dalam sebuah penelitian sejarah. Tahapan tersebut secara berurutan meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan. Merujuk pada rumusan tersebut, maka setelah penentuan topik, dilakukan pengumpulan sumber yang kemudian dilakukan verifikasi (kritik sumber) yang dilakukan dengan cara pembacaan secara menyeluruh dan dilakukan perbandingan satu sama lain hingga didapatkan data yang valid dan saling mendukung.

Selain pendekatan historis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan interpretatif untuk menjelaskan dampak peristiwa Malari 1974 terhadap kemunduran pers mahasiswa. Pendekatan tersebut juga mencakup.

1. Historis

Berdasarkan pendekatan historis, penelitian ini menempatkan peristiwa Malari 1974 dalam konteks sejarah politik dan sosial, dengan tujuan memahami latar belakang dan dampak jangka panjangnya

2. Teori Dampak Politik

Mengadopsi teori dampak politik, penelitian ini menganalisis bagaimana campur tangan politik dalam peristiwa Malari 1974 secara langsung mempengaruhi keberlanjutan dan kebebasan pers mahasiswa.

Dengan menggabungkan metode dan metodologi seperti ini, penelitian dapat menyajikan gambaran holistik tentang bagaimana peristiwa sejarah tertentu, seperti Malari 1974, mempengaruhi perkembangan dan kemunduran pers mahasiswa dalam konteks politik dan sosial.

## **PEMBAHASAN**

Peristiwa Malapetaka 15 (Lima Belas) Januari, yang juga dikenal sebagai peristiwa malari, adalah kerusuhan pertama dalam sejarah Orde Baru. Ini adalah

klimaks dari serangkaian peristiwa yang berasal dari penentangan dan protes mahasiswa terhadap modal asing, khususnya Jepang, dan merebaknya kasus-kasus penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh para pembesar dan petinggi pada masa Orde Baru. Peristiwa ini kemudian menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia untuk menjadi bagian dari Orde Baru. Hal inilah memicu demonstrasi mahasiswa sebagai penentangan adanya modal asing, yang menjadi sebab peristiwa Malari pada tahun 1974 itu.

Adanya demonstrasi dan protes mahasiswa pada tahun 1970, menandai adanya perguncangan di awal Orde Baru. Mahasiswa melakukannya karena beberapa alasan, seperti jumlah siswa yang terus meningkat meskipun budget pendidikan relatif berkurang, jumlah siswa baru tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia, inflasi yang meningkat, dan peningkatan kesulitan hidup, alasan itu menimbulkan adanya ketegangan. Selain itu, korupsi yang meningkat di tahun 1970 mengiringi pertumbuhan ekonomi dan tanda-tanda awal boom minyak. Namun, hanya sekelompok kecil orang yang mulai menikmati perbaikan tingkat hidup umum sebagai hasil dari kemajuan.

Surat kabar mahasiswa Bandung, Mahasiswa Indonesia, menyatakan tahun 1970 sebagai "tahun ketidakpuasan". Abar juga menyatakan dalam bukunya bahwa pada masa itu, beberapa harian kritis secara langsung menuduh sejumlah perwira yang dekat dengan Presiden Soeharto, seperti Ibnu Soetowo, Sudjono Humardani, dan Achmad Tirtosudiro, terlibat dalam korupsi. Namun, unjuk rasa mahasiswa dipicu oleh kenaikan harga minyak pada awal 1970-an. Dalam situasi ini, Victor D., Arief Budiman, Sjahrir, dan Julius Usman yang merupakan anggota gerakan "Mahasiswa Menggugat", mengadakan demonstrasi dan protes terhadap korupsi dan kenaikan harga minyak. Para mahasiswa membagikan selebaran, menempelkan poster, dan menyebarkan isu permasalahan mereka.

Protes mahasiswa kembali muncul pada tahun 1972. Perkara ini sendiri dimulai ketika Ibu Tien Soeharto mengusulkan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ibu Tien mencari berbagai sumber dana untuk melaksanakan proyek yang mahal ini, terutama meminta beberapa lembaga resmi untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Ini terjadi saat presiden dengan keras meminta untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mencurahkan seluruh upaya pada pembangunan. Inisiatif Ibu Negara ini segera dianggap tidak tepat karena tidak hanya tidak memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan negara karena biaya yang tinggi dan metode yang tidak jelas untuk mendapatkan dana. Sebagai protes terhadap apa yang mereka anggap penghamburan yang tidak dapat diterima karena terbatasnya kemampuan keuangan negara, maka para mahasiswa di Bandung dan Jakarta membuat berbagai gerakan ad-hoc dengan nama-nama lucu, seperti Gerakan Penyelamat Uang Rakyat, dan Gerakan Akal Sehat (GAS)

Pada tanggal 5 Agustus 1973, di tengah keadaan politik yang semakin menegang, terjadi kerusuhan anti-Cina di Bandung. Bermula dari pemukulan seorang pribumi oleh orang Cina, sekelompok pemuda pribumi, terutama anak-anak muda, kemudian menyerang penduduk Tionghoa. Mereka menyerang dan melempari kaca etalase toko dan rumah mereka, serta merusak dan membakar kendaraan dan pabrik milik orang Tionghoa. Karena kerusuhan ini, satu orang meninggal, lima puluh orang luka-luka, banyak rumah dirusak, 300 mobil hancur, sebuah gereja dan tiga pabrik tekstil rusak. Sejumlah media pada saat itu menghubungkan peristiwa ini dengan ketidakpedulian pemerintah terhadap masalah kesenjangan ekonomi yang besar antara penduduk pribumi dan nonpribumi.

Pada tanggal 24 Oktober 1973, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) yang dipimpin oleh Hariman Siregar, seorang mahasiswa kedokteran, menyampaikan sebuah petisi kepada pemerintah, militer, teknokrat, politisi, dan akademisi. Hal ini kemudian mendapatkan momentum. Sebagai bagian dari ziarah untuk menghormati para arwah pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, petisi itu sendiri dibaca dalam sebuah upacara simbolis. Pembacaan sajak-sajak tentang protes dan nyanyian-nyanyian dengan nada protes dilakukan sebelum penyampaian petisi ini. Petisi yang dibuat oleh mahasiswa pada tanggal 24 oktober mencakup hal-hal berikut:

1. Mengingatkan pemerintah, militer, intelektual, dan politisi tentang hal-hal berikut: Untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan, pertimbangkan kembali strategi pembangunan dan buat suatu yang mengimbangi aspek sosial, politik, dan ekonomi.
2. Segera bebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastian, pemerkosaan hukum, peningkatan harga, dan pengangguran.
3. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi, dan pendapat masyarakat harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya.
4. Kami adalah yang paling penting untuk masa depan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban kami juga untuk menentukan masa depan, terlepas dari keadaan saat ini.

Petisi ini kemudian menjadi inspirasi bagi protes dan demonstrasi jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa; itu juga mendukung kritik masyarakat dan pers terhadap politik pembangunan yang ada. Judilherry Justam, seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UI pada masa itu dan Sekretaris Jendral Ketua DMUI saat itu, mengatakan bahwa suasana atau *zeitgeist* yang tidak puas, terutama tentang modal asing dan perbedaan yang semakin meningkat antara orang kaya dan miskin, mendorong mahasiswa untuk bertindak.

Mahasiswa, yang merupakan representasi dari generasi muda pada saat itu, pada akhirnya tampil sebagai kekuatan moral untuk menentang keadaan yang

dianggap tidak sesuai dengan jalan kemakmuran rakyat yang mereka kampanyekan saat menumbangkan Orde Lama dan membidani Orde Baru. Mereka tidak percaya pada teori *Trickle Down Effect* yang mengatakan bahwa kemakmuran akan turun dan dirasakan oleh banyak orang (*Trickle Down Effect*). Pada akhirnya, petisi "24 Oktober", yang diajukan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1973, menjadi inspirasi untuk meminta reevaluasi strategi pembangunan saat ini.

Mahasiswa di kota-kota lain juga mengeluarkan pernyataan yang senada dengan petisi Jakarta. Pernyataan ini sendiri merupakan respons spontan para pemuda terhadap pihak yang berkuasa. Gerakan mahasiswa di Jakarta, Bogor, dan Bandung menandai akhir tahun 1973. Di Istana Negara, seratus anggota Dewan Mahasiswa mencoba bertemu Soeharto untuk menyampaikan tuntutan mereka. Meskipun demikian, ini tidak berhasil karena Presiden tidak hadir. Setelah itu, mereka mencoba bertemu dengan Sudharmono, Sekretaris Negara, tetapi dia tidak hadir. Mahasiswa kemudian menuju rumah Presiden di Jl. Cendana. "Dialog langsung" itu tidak terjadi karena Soeharto tidak ada disana.

Tanggal 12 Januari, Hariman Siregar, ketua DMUI, menyatakan bahwa akan diadakan gerakan menyambut Tanaka untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih memiliki kebanggaan nasional dan masih banyak orang yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Pernyataan ini merupakan langkah awal dari aksi demonstrasi mahasiswa yang menyambur PM Tanaka pada tanggal 14 Januari. Selanjutnya, demonstrasi besar-besaran diadakan pada tanggal yang ditetapkan untuk menentang kedatangan PM Jepang di lapangan terbang Halim Perdanakusuma. Para demonstran gagal masuk karena dihalangi dengan senjata api oleh petugas keamanan. Aksi mahasiswa, yang selama ini menjadi kekuatan moral untuk melakukan kontrol dan kritik, terus bergerak dan merengsek. terutama setelah adanya "kontak" antara mahasiswa demonstran dan PM Jepang dihalangi oleh pengawasan yang ketat dari aparat keamanan, hal ini menimbulkan ketegangan suhu yang semakin meningkat

Untuk mengevaluasi demonstrasi sebelumnya yang menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, puluhan perwakilan Dewan Mahasiswa (Dema) dari berbagai universitas di Jawa berkumpul di Student Centre Universitas Indonesia pada malam harinya. Gurmilang Kartasasmita, wakil ketua DMUI dan teman dekat Hariman Siregar, bertanggung jawab atas persiapan rapat. Dua masalah yang dibahas adalah rencana untuk berbicara dengan Tanaka dan menentukan jalur demonstrasi. Untuk melakukan aksi, mahasiswa dan aktivis non-kampus berkumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 15 Januari 1974. Masa aksi sendiri kemudian berkonsentrasi di Universitas Trisakti.

Mereka berangkat dari Salemba sekitar jam 08.00 dengan membawa tema utama dengan tiga tuntutan: pembubaran Aspri, penurunan harga, dan penghapusan

korupsi, yang kemudian dikenal sebagai "Tritura 1974". Mereka kemudian berjalan kaki menuju Jalan Raden Saleh, lalu menuju Cikini, Gambir, dan Merdeka Timur. Setelah itu, massa aksi kemudian terus bergerak menuju Monumen Nasional. Sepanjang perjalanan, jumlah demonstran meningkat, terutama karena adanya siswa sekolah menengah. Mereka menurunkan bendera penambutan tamu negara menjadi setengah tiang sebagai tanda duka cita atas kedatangan Tanaka. Sampai keesokan harinya, kerusuhan massa terus berlangsung. Pada tanggal 16 malam, akhirnya Hariman Siregar, ketua DMUI, menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Untuk menenangkan para demonstran, dia kemudian tampil di televisi. Dia membacakan deklarasi Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang kekerasan. Hasil sementara dari perhitungan mahasiswa Indonesia menunjukkan bahwa kerusuhan tersebut menyebabkan sedikitnya 9 orang meninggal, 23 luka-luka, dan seluruh Pusat Perdagangan Senen. Banyak mobil dibakar, terutama mobil buatan Jepang, dan banyak bangunan, baik Jepang maupun bukan. Sementara itu, Abar, mengutip dari Jenderal M Panggabean, menyatakan bahwa 807 mobil dan 187 motor hancur, 144 gedung rusak atau terbakar, 160 kg emas hilang, dan 11 orang meninggal, 17 orang luka berat dan 120 orang luka ringan.

Pada akhirnya, keadaan politik yang tidak menentu ini berakhir dengan penangkapan yang dilakukan pemerintah terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keterlibatan dalam kerusuhan tersebut. Raillon menyatakan bahwa sekitar 700 orang telah ditangkap dan 45 orang masih ditahan, termasuk Hariman Siregar, mantan pemimpin PSI seperti Soebadio Sastrosatomo dan Profesor Sarbini Sumawinata, Pengacara Adnan Buyung Nasution, dosen UI Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan aktivis muda Islam seperti H. Princen dan Rahman Tolleng. Media Indonesia melihat peristiwa itu sebagai masa kelabu.

Pada saat itu, ada sekitar dua belas jenis media cetak yang didistribusikan, termasuk Nusantara, Indonesia Raya, Pedoman, Kami, Mahasiswa Indonesia, The Jakarta Times, Abadi, Suluh Berita, Pemuda Indonesia, Indonesia Pos, mingguan Wenang, dan majalah Ekspres. Pemerintah mengatakan bahwa media ikut bertanggung jawab atas insiden malari. Media dianggap berperan dalam memperburuk keadaan politik yang akhirnya mengarah pada aksi huru-hara yang mengakibatkan kerusakan materi dan korban jiwa. Pemerintah percaya bahwa pers tidak bertanggung jawab, terutama terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, setelah krisis malari, pemerintah menertibkan hak pers, termasuk mengontrol pemberitaan di media nasional, yang dikenal sebagai pembredelan.

Setelah Peristiwa 15 Januari 1974, pemerintah memblokir banyak media umum. Sebagai subsistem dari sistem pendidikan tinggi, media mahasiswa didirikan di kampus. Surat kabar Kampus Salemba (UI), Gelora Mahasiswa (UGM), Atmajaya (Unika Atmajaya), Derap Mahasiswa (IKIP Yogyakarta), Arena (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan Airlangga (Universitas Airlangga, Surabaya) adalah beberapa contoh

dari organisasi mahasiswa yang muncul. Media mahasiswa di universitas itu disubsidi oleh universitas setidaknya 50% dari biaya penerbitan, sehingga mereka bergantung pada pemimpin universitas.

Setidaknya terdapat 12 media cetak yang diterbitkan harus kehilangan SIT dan SIC beberapa minggu setelah peristiwa Malari 1974. Karena peristiwa malaria juga 470 orang ditahan, termasuk Mochtar Lubis dari harian Indonesia Raya, yang mengkritik pemerintah (Hill, 2011b). "Persahabatan" yang disembunyikan antara pemerintah dan media serta demonstran-mahasiswa dirusak oleh gelombang kemarahan ini. Jurnalis yang dianggap menghina pemerintah langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh pemerintah melalui aparatnya. Setelah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pers dan Grafika, dia dapat kembali bekerja untuk perusahaan penerbitan.

Pemerintah pun mengambil kebijakan bahwa pers mahasiswa harus kembali ke kampus. Setelah beberapa anggota IPMI menyetujui keputusan pemerintah bahwa Pers Mahasiswa harus kembali ke kampus, IPMI dipaksa kembali ke kampus pada tahun terakhir Kongres III. Terpaksa, kemunduran terjadi lagi dalam IPMI. Banyak media mahasiswa di luar kampus berguguran. Sampai Kongres IV di Medan pada Maret 1976, IPMI belum menemukan solusi untuk masalah hidup, baik di dalam maupun di luar kampus. IPMI belum berhasil menghindari masalah hidup kampus, baik di dalam maupun di luar, selama kongres tersebut. Terakhir, IPMI gagal bertahan, tidak menghasilkan AD/ART baru, dan banyak ditinggalkan oleh anggota LPM. Anggota LPM pada saat itu terlalu senang mengurus masalah di dalam kampus masing-masing, sehingga mereka lupa tentang kewajiban organisasi skala nasional yang pernah dibentuk bersama. Meskipun demikian, media kampus seperti Salemba (UI), Gelora Mahasiswa (UGM), dan Kampus (ITB) masih berani mengkritik sosial.

Pemerintah kembali melakukan pembredelan terhadap beberapa surat kabar umum terkenal pada tahun 1978. Media umum banyak yang di bredel pada awal tahun 1978 karena adanya ketakutan pemerintah waktu itu terhadap institusi pers seperti KOMPAS, SINAR HARAPAN, MERDEKA, dan INDONESIA TIMES. Akibatnya, "dunia" pers yang kosong dipenuhi oleh media mahasiswa Indonesia dengan pemberitaan yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa: kritis, berani, dan keras. Surat Kabar Mahasiswa mencapai puncaknya di era ini. Namun, Daniel Dakidae mengatakan bahwa pers mahasiswa adalah pilar kebebasan pers, dan mereka akhirnya dihukum karena kritik dan keberanian menyuarakan kebenaran di masyarakat. Setelah itu, undang-undang NKK/BKK yang mewajibkan media mahasiswa untuk masuk ke dalam kampus, hampir semua media mahasiswa di "matikan".

Pers mahasiswa yang mengisi kosong pers umum ini, dan tiras mahasiswa terjual hingga puluhan ribu kopi dan banyak dibaca orang di luar kampus. Tapi penerbitan mahasiswa ini kemudian juga dibredel oleh pemerintah, dan mereka tidak

boleh terbit lagi sampai enam bulan kemudian. Oleh karena itu, terdapat banyak variasi dalam bentuk media massa dan cara distribusinya selama paruh pertama pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Media, seperti jurnal, majalah, surat kabar mingguan, surat kabar harian, dan surat kabar mahasiswa, memiliki berbagai jenis distribusi. Ada yang hanya tersebar di dalam lembaga, yang lainnya tersebar di luar lembaga. Ketika ada peraturan yang membatasi publikasi seperti media mahasiswa, kategori ini menjadi terbatas. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Penerangan RI tentang penerbitan di kampus dikeluarkan pada 31 Mei 1980. Media kampus terbagi menjadi tiga kategori: media kampus, media mahasiswa, dan media mahasiswa, menurut SKB ini. SKB ini dibuat untuk mendukung implementasi Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

Namun, belum genap setahun, Salemba, Gelora Mahasiswa, dan Kampus kembali dilarang terbit karena dianggap tidak mengubah isi beritanya. Dalam keadaan seperti ini, Kongres V IPMI diadakan di Jakarta pada Mei 1980. Namun, belum ditemukan solusi fundamental untuk masalah yang dihadapi. IPMI menghadapi masalah karena ingin tetap independen. Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Gafur berjanji untuk meng-KNPI-kan IPMI sebelum kongres. Namun, IPMI dalam kongresnya tetap menolak bergabung dengan KNPI, sehingga Gafur mengancam akan mematikan IPMI.

IPMI tidak dapat menyelenggarakan kongres berikutnya. IPMI tidak dapat mengakses lembaga penerangan pemerintah. Di beberapa kampus, masih ada media mahasiswa, tetapi tidak ada lagi yang mencapai tiras besar seperti Kampus, Salemba, atau Gelora Mahasiswa. Pendidikan dan pelatihan pers mahasiswa adalah satu-satunya cara IPMI bertahan selama periode 1980-1982. Setelah kepengurusan terakhir IPMI berakhir, namanya semakin hilang. Kehidupan pers mahasiswa baru pulih pada akhir 1985. Pada tahun 1986, ada 47 penerbitan fakultas dan jurusan di UGM, dengan 26 di antaranya masih aktif dan minimal terbit sekali setiap semester. Para pimpinan penerbitan ini mengadakan Seminar Pers Mahasiswa di UGM. Di sana, mereka setuju untuk membuat majalah yang berorientasi pada intelektualisme sebagai media tingkat universitas. Balairung, majalah pertama BKK, keluar pada 8 Januari 1986. Pada tahun 1989, beberapa kampus di Yogyakarta mencatat 69 publikasi mahasiswa. Balairung sempat terbit 14 kali dengan tirai 2.500 hingga 5.000 eksemplar sampai NKK/BKK dicabut pada Juli 1990.

Pada masa itu, Warta UI, surat kabar kampus yang ditulis oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, terbit hampir setiap hari di Universitas Indonesia. Namun, karena ketergantungan keuangan UI dan hubungan yang tidak dapat dihindari dengan Rektorat UI, pemberitaan Warta UI kurang tajam dan kurang mengangkat masalah politik daripada Solidaritas. Selain itu, sulit bagi wartawan UI untuk mengkritik pimpinan universitas dalam pemberitaan mereka. Meskipun demikian, banyak alumnus Warta UI akhirnya menjadi jurnalis profesional.

Universitas Nasional (Unas) adalah Universitas swasta di Jakarta yang memiliki penerbitan mahasiswa terbaik. Pola kelahirannya seperti Balairung. Pada Oktober 1986, Musyawarah Pers Mahasiswa Unas diadakan atas prakarsa majalah Fisip Politika. Pada kesempatan itu, mereka setuju untuk menerbitkan media tingkat universitas yang disebut Solidaritas. Pengelola Solidaritas, yang diterbitkan pada Desember 1986, terdiri sebagian besar dari pengurus politik. Balairung dan Solidaritas beruntung karena pimpinan universitas sangat menghargai mereka dan memberikan mereka kebebasan yang cukup. Namun, edisi kedua dirilis pada Januari 1987, Laksusda Jaya melarang penerbitan Solidaritas.

Media mahasiswa memang dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Surat Edaran Dikti No. 849/D/T/1989 mengenai Penerbitan Kampus di Perguruan Tinggi dan Permenpen RI No. 01/Per/Menpen/1975 melarang media mahasiswa. Dengan peraturan ini, jurnalis mahasiswa dilarang menulis tentang hal-hal di luar masalah kampus dan dikotak-kotakan. Seolah-olah mahasiswa FE dan FT hanya boleh berbicara tentang ekonomi dan teknik, dan mereka terisolasi dari masalah sosial lainnya.

Selain itu, selama periode ini terjadi pembredelan terhadap sejumlah media mahasiswa. Contohnya adalah Arena di IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Opini di FISIP Undip di Semarang, Percakapan di FISIP Unair di Surabaya, dan Vokal di IKIP PGRI Semarang. Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Semarang (FKPMS) melakukan "Aksi Keprihatinan Pembredelan Pers Mahasiswa" pada 26 Juni 1993. Mereka mendirikan kemah keprihatinan di lapangan basket Undip sebagai bentuk dukungan terhadap pembredelan Arena. Di Semarang, perwakilan lembaga pers mahasiswa dari berbagai PTN dan PTS mengikuti acara tersebut. Solidaritas Mahasiswa Jakarta (SMJ) didirikan oleh aktivis mahasiswa di Jakarta pada tahun 1992. SMJ berbasis pada aktivis pers mahasiswa dan diwadahi oleh organ FKPMJ (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta) dan SMUJ (Senat Mahasiswa Universitas se-Jakarta).

## **KESIMPULAN**

Peristiwa Malari 1974 merupakan hasil dari akumulasi ketidakpuasan dan protes mahasiswa sejak tahun 1970. Faktor-faktor seperti peningkatan harga minyak, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inflasi, dan kesulitan hidup menjadi pemicu terjadinya protes. Mahasiswa diidentifikasi sebagai kekuatan moral yang menentang keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kesejahteraan rakyat. Represi terhadap mahasiswa dan pers tampaknya menjadi reaksi pemerintah terhadap peristiwa ini. Pemerintah mengontrol informasi dan meredam kritik dengan membredel pers. Lebih lanjut, pemerintah memaksa pers mahasiswa untuk kembali ke kampus.

Semangat kritis mahasiswa tidak hilang sama sekali meskipun ada tindakan represif. Walaupun rentan terhadap pembredelan, pers mahasiswa tetap eksis dan

berani mengkritik. Pada akhirnya, kebebasan pers mahasiswa mengalami gangguan; ada peregangan antara keinginan pemerintah untuk mengontrol dan keinginan mahasiswa untuk menyuarakan kebenaran. Peristiwa Malari 1974 mencerminkan perubahan sosial dan politik yang terjadi pada saat itu; mahasiswa memainkan peran penting dalam menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagir Manan. 2010. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta. Dewa Pers
- Eddyono. 2021. *Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Djinakkan Hingga Dibungkam*. Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi
- Fathoni, Moh. 2020. *Catatan Yang Belum Selesai*. PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia)
- Hasibuan, Airlambang, Rizal. 2011. *Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Jakarta. Q-Communication
- Zainal Abidin Ahcmad. 2021. *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia*. Surabaya. Penerbit Sahaja
- Zulkarnain Hamson. 2021. *Pers dalam Lintasan Peradaban*. Makassar. Jurnalis Online Indonesia

### Artikel Jurnal

- Aditia Muara, "Introduction to Malari: Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh pada Awal Orde Baru 1970-1974", *Jurnal Criksetra*, vol. 4, no. 8, 2015.
- Firdaus, M. Rifki, "Pembredelan Pers Pasca Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974", *Bihari*, vol. 5, no. 1, 2022.

### Website/Online

- Agus Gussan Susantoro, "Sejarah Pers Mahasiswa Indonesia", *Persma Poros*, 2021, [Online]. Tersedia: <https://persmaporos.com/sejarah-pers-mahasiswa-indonesia/> [Diakses 17 Desember 2023].
- Satrio Arismunandar, "Sejarah dan Fenomena Pers Mahasiswa", *Academia*, 2012, [Online], Tersedia: [https://www.academia.edu/4979961/Sejarah\\_dan\\_Fenomena\\_Pers\\_Mahasiswa](https://www.academia.edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa) [Diakses: 18 Desember 2023].
- Vanya Karunia, "Sejarah Masa Orde Baru (1966-1998)", *Kompas.com*, 3 November 2022, [Online]. Tersedia: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/140000869/sejarah-masa-orde-baru-1966-1988-> [Diakses:17 Desember 2023].